

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Memahami mekanisme kerja dari setiap rezim politik bukan hanya dilihat dan dianalisa dari praktik pengambilan kebijakan atau cara rezim mengatur kinerja pemerintahannya. Tapi dapat pula dilihat dari pola-pola simbolik yang digunakan oleh rezim politik, baik itu wacana yang diproduksi, tutur-bahasa yang digunakan, hingga pada proses pencitraan yang menggambarkan respon tiap rezim terhadap persoalan-persoalan politik yang terjadi.

Menjadi lazim bagi setiap orde politik untuk menciptakan sistem simbol yang mencerminkan kekhasan kekuasaannya. Orde politik di era Sukarno, misalnya, memproduksi gagasan Nasakom sebagai gugus simbolik yang bertujuan menyatukan komponen kekuatan politik yang terfragmentasi pada masa itu. Di masa orde baru, sistem simbolik bersarang pada wacana pembangunan. Begitupun di era SBY-JK, wacana *good governance* dijadikan simbol utama untuk merepresentasikan visi besar pemerintahan. Rezim politik juga seringkali melukiskan dirinya dalam bahasa simbolik seperti “penyambung lidah rakyat”, “bapak pembangunan”, atau “anak bangsa”.

Pemilik simbol dapat mengejewantahkan dirinya seperti apa yang disimbolkan. Jika demikian, rezim politik bisa menjalankan praktik kekuasaannya atas nama simbol yang ia ciptakan sendiri. Ia memiliki wewenang untuk

menjadikan simbol itu nyata dan mendapatkan pengakuan bahwa rezim politik memiliki mandat untuk bertindak sesuai dengan karakter yang disimbolkan.

Simbol mengandung kekuatan untuk membentuk wajah realitas. Kekuatan itu tersimpan dalam proses kategorisasi, penilaian, dan pemaksaan ide-ide tertentu kepada obyek yang menafsirkan simbol. Dalam dunia politik, operasi kerja kekuatan simbol tak bisa dilepaskan dari struktur atau aktor politik yang berkepentingan mengkonstruksi realitas. Wacana terorisme, misalnya, digunakan oleh pemerintah untuk menentukan kelompok mana yang disebut teroris dan mana yang bukan. Terorisme sebagai wacana simbolik dijadikan modal politik bagi pemerintah dalam mengesahkan UU terorisme yang memberikan payung hukum sah untuk melakukan praktik politik, seperti membuat kategori teroris hingga ke proses penangkapan terhadap kelompok-kelompok yang dikategorikan teroris.

Hal yang sering kita lupakan ialah menguak mekanisme kerja dibalik kekuatan simbolik itu. Wacana terorisme sebagai wacana dominan yang mempengaruhi kebijakan semua negara saat ini tidak terlahir dari ruang yang steril atau bebas dari kepentingan. Wacana simbolik ini menjadi dominan karena diproduksi oleh negara Amerika Serikat yang memiliki kekuasaan ekonomi-politik melebihi negara-negara lain. Melalui kekuasaan yang dimilikinya, wacana terorisme disebar ke setiap negara sebagai program politik. Didukung oleh globalisasi ekonomi, wacana terorisme dijadikan paket wajib untuk dilaksanakan oleh semua negara, termasuk Indonesia.

Mau tidak mau, pemerintah menyambut paket wajib ini dalam program politiknya karena isu terorisme bukan lagi sekedar wacana *an sich* tapi memuat

implikasi ekonomi-politik bagi negara-negara yang tidak mendukung isu tersebut. Negara yang tidak sepakat dengan program anti-terorisme dapat dimarginalkan dari pergaulan ekonomi dunia, investor asing enggan masuk, mendapat hambatan untuk peminjaman hutang, atau ditekan secara politik. Dengan begitu, pemerintah -disebabkan otoritas dan legitimasi yang didapatkan dari Amerika Serikat- mempunyai kekuatan simbolik untuk mengkonstruksi dan mendefinisikan realitas sesuai dengan selera dan ideologinya.

Contoh lain yang berkenaan dengan kuasa simbolik ialah wacana *good governance* yang diusung pemerintahan SBY-JK sebagai visi besar pengelolaan negara. Mengacu pada pandangan Edward Said di bagian pendahuluan *magnum opus*-nya *Orientalism* menyatakan bahwa “tidak ada hal yang hadir begitu saja ada; yang sesungguhnya muncul adalah ‘diadakan’ (*re-presence*) atau re-perenstasi”.¹ Dibalik pewacanaan *good governance* menyembunyikan relasi kuasa yang tak tampak, seolah-olah obyektif.

Gagasan *good governance* pertama kali digunakan oleh Bank Dunia tahun 1989 dalam laporannya yang berjudul *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth*. Kelahiran kosep *good governance* berkaitan erat dengan konstruksi pembangunan bagi dunia ketiga. Seperti yang didefinisikan oleh World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, investasi tanpa hambatan, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan

¹ “there is no such things as a delivered presence; there is only re-presence, or representation”. Edward Said, *Orientalism*. New York: Vintage Books, 1978. 11-21

legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Meskipun terdapat definisi beragam mengenai istilah *good governance*, tetapi peletakan elemen-elemen dasar konsepsi ini bermula dari Bank Dunia.

Kemunculan *good governance* sebagai wacana dominan berkaitan dengan kegagalan kapitalisme awal yang mengalami depresi ekonomi tahun 1930-an dan berujung pada akumulasi kapital melambat. Penyebabnya antara lain, proteksi dari negara, paham keadilan sosial, kesejahteraan rakyat, serta berbagai tradisi adat pengelolaan sumber daya alam berbasis rakyat. Untuk mengembalikan putaran kapital tanpa ada rintangan, salah satu strategi yang dijalankan oleh kapitalisme ialah menggagas konsep *good governance*.

Dalam wacana *good governance*, demokrasi sebagai kerangka politik diperlukan demi kesuksesan pembangunan ekonomi dan ekonomi liberal menjadi mazhab utama bagi pembentukan tata ekonomi yang lebih baik. Demokrasi dan ekonomi liberal berhubungan erat secara konseptual. Artinya, upaya mendorong demokrasi secara bersamaan mendorong pula ekonomi pasar bebas. Bank Dunia sendiri melalui staf seniornya menyatakan, *governance* berarti pemerintah yang kompeten dan memiliki akuntabilitas yang “didedikasikan pada kebijakan-kebijakan ekonomi liberal”.²

Ditilik lebih jauh, politik wacana *good governance* telah mengaburkan relasi kuasa dan dominasi melalui justifikasi lembaga, aktor politik, dan sihir-sihir teorinya. Hubungan yang menindas dan memaksa dari kapitalisme ditutupi sedemikian rupa oleh wacana *good governance*. Dengan meminggirkan peran

² Dinding dari Dita Alaburhan, *Good Governance: Sebuah Kritik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hal. 88.

negara, ruang bagi pasar dan lembaga-lembaga swasta semakin diperluas. Menjadi jelas bahwa wacana *good governance* menyembunyikan kuasa ideologi tertentu untuk menciptakan tata ekonomi-politik baru.

Muncul pertanyaan, mengapa wacana *good governance* diterima begitu saja oleh masyarakat sebagai konsep yang sah dan dianggap mujarab? Dengan menggunakan argumen Pierre Bourdieu, “Apa yang menciptakan kekuatan kata-kata dan slogan, sebuah kekuatan yang mampu mempertahankan atau mensubversi tatanan sosial, adalah kepercayaan akan legitimasi kata-kata dan orang yang mengucapkannya”.³ Sebuah konsep, bahasa, atau wacana dianggap sah atau *legitimate* tergantung kepada siapa yang mengucapkannya (memproduksi). Dalam ranah politik, jika seseorang atau lembaga mendapatkan otoritas dan legitimasi untuk mengucapkan sesuatu, memproduksi wacana maka ucapan atau wacana tersebut dianggap sebagai kebenaran.

Ketika Bank Dunia, seorang Presiden atau aparatus negara yang mendapatkan otoritas untuk mensosialisasikan gagasan dan praktik *good governance*, maka masyarakat memandangnya sebagai sesuatu yang *legitimate* (sah). Otoritas melekat dengan kekuasaan untuk menamakan dan memproduksi wacana tertentu. Dari argumen tersebut, *good governance* menjadi kekuatan efektif menata cara berpikir dan bertindak masyarakat. Tidak perlu lagi membongkar konsep *good governance* atau menguak kepentingan dibalik konsep itu. *Good governance* -lewat kekuasaan simbolik yang bekerja- tampil sebagai

³ “What creates the power of words and slogan, a power capable of maintaining or subverting the social order, is the belief in the legitimacy of words and of those who utter them”. Pierre Bourdieu, *Practical Reason*, Cambridge University Press, 1991, 11, 120.

ramuan mujarab yang dianggap dapat menyembuhkan kondisi bangsa yang sedang sakit.

Dalam diskursus ilmu politik, studi mengenai kekuasaan (*power*) menempati posisi sentral. Karenanya, tidak heran apabila sebagian orang menyatakan bahwa hubungan politik dan kekuasaan ibarat dua sisi mata uang yang saling berkaitan. Kekuasaan (*power*) merupakan sebuah bentuk konsepsi yang memiliki arti yang beragam. Kalau kita runut, kajian terhadap kekuasaan sudah berlangsung sejak lama, dimulai dari zaman Yunani hingga masa kontemporer saat ini. Meskipun sudut pandang yang digunakan untuk membedah kekuasaan beraneka ragam, tapi ada prinsip umum yang dapat kita sepakati yaitu setiap kekuasaan cenderung untuk dipertahankan, dilestarikan, dan diproduksi kembali oleh aktor atau institusi yang memiliki kekuasaan.

Strategi mempertahankan dan melestarikan sebuah kekuasaan mengandaikan penggunaan kekerasan. Pertautan keduanya –kekuasaan dan kekerasan- seringkali terwujud dalam bentuk yang plural. Ada yang mengabsahkan pemakaian segala cara meskipun buruk yang penting kekuasaan tetap terjaga. Pemikiran seperti ini dapat kita temukan pada pemikiran politik Niccolo Machiavelli dalam karyanya *Il Principe*. Bagi Machiavelli, kekuasaan harus dilestarikan melalui cara apapun agar kedaulatan sang penguasa (negara) tetap tegak. Karenanya penggunaan kekerasan yang bersifat fisik pun dapat dibenarkan, seperti intimidasi, penyiksaan, penculikan, dan sebagainya. Dengan kata lain, negara memiliki kewenangan melakukan politik kekerasan untuk mempertahankan dominasinya terhadap yang dikuasainya.

Akan tetapi, praktik dominasi kekuasaan tidak semata-mata diadakan melalui kekerasan fisik. Antonio Gramsci –seorang pemikir neo marxis dari Italia– menyatakan bahwa kekuasaan dapat dilanggengkan melalui strategi hegemoni. Hegemoni yang dimaksudkan oleh Gramsci ialah peran kepemimpinan intelektual dan moral (*intellectual and moral leadership*) untuk menciptakan ide-ide dominan.

Berangkat dari kritiknya terhadap konsepsi kekuasaan ala Karl Marx yang mereduksi praktik dominasi pada struktur ekonomi, Gramsci lebih jauh berpandangan bahwa kekuasaan diperoleh lewat hegemoni ide-ide (dalam wilayah budaya) yang didasarkan atas mekanisme konsensus. Melalui hegemoni, ide-ide yang diciptakan penguasa menentukan struktur kognitif masyarakat. Upaya hegemoni ini berlangsung untuk menggiring persepsi orang dalam kerangka yang telah ditentukan oleh negara. Misalnya, pada masa orde lama, Sukarno menciptakan hegemoni ide dalam wujud musuh bersama (*common enemy*) yaitu neo kolonialisme dan imperialisme. Atau di era Soeharto yang menjadikan anti PKI sebagai ide besar. Ide-ide dominan tersebut mampu menghasilkan konsensus bersama serta menciptakan rasa persatuan masyarakat bahwa musuh besar bangsa adalah Nekolim dan PKI. Dengan begitu, hegemoni cenderung mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas yang sesungguhnya. Tujuannya tak lain adalah mempertahankan kekuasaan penguasa negara.

Untuk menjaga keberlangsungan proses reproduksi kekuasaan dan relasi kekuasaan, Louis Althusser –salah seorang pemikir neo marxis lainnya– meletakkan negara sebagai institusi sentral yang berperan memusatkan dan

memaksa masyarakat dalam reproduksi kekuasaan. Dimulai dengan merevisi teori marxis tentang *state power*, Althusser membedakan antara kuasa negara (pemeliharaan kekuasaan negara atau perebutan kuasa negara) sebagai tujuan perjuangan kelas politik dan aparatus negara di sisi lain.

Dalam pandangan Althusser, kuasa negara masih dapat berubah dan berganti akibat dari perebutan kekuasaan oleh kelas-kelas politik yang ada. Sedangkan aparatus negara relatif bisa bertahan meski terjadi peralihan kekuasaan. Bercermin pada momen politik reformasi 1998 di Indonesia, kita dapat melihat bahwa meski telah terjadi peralihan kekuasaan yang ditandai turunnya Soeharto lewat kekuatan-kekuatan politik yang ada pada saat itu, namun aparatus negara (politisi, partai politik, atau militer orde baru) tetap melanggeng di struktur kekuasaan.

Althusser lebih lanjut memaparkan distingsi aparatus negara dalam kaitannya dengan reproduksi kekuasaan. *Pertama*; Aparatus Negara Represif (*Repressive State Apparatus, RSA*) yang bekerja dengan cara represif melalui kekerasan fisik maupun non-fisik, seperti pemerintah, militer, polisi, lembaga peradilan. Yang *kedua*; Aparatus Negara Ideologis (*Ideological State Apparatus, ISA*). Modus kerja ISA berlangsung melalui cara-cara yang ideologis-persuasif, seperti lembaga agama, pendidikan, media massa, partai politik, dan sebagainya.⁴ Pada bentuk kedua inilah, negara memperkuat kekuasaannya melalui muatan-muatan ideologi yang tak tampak.

⁴ Ada pula Aparatus Negara yang berada di kedua posisi tersebut, misal; hukum dapat menggunakan cara represif (penangkapan, hukuman fisik) dan juga memakai cara ideologis (undang-undang, inpres, dll). Lihat Louis Althusser, *Tentang Ideologi: Marxisme Strukturalis, Dialektika, Cultural Studies, Yogyakarta: Jalasutra*, hlm. 18-20.

Perjuangan dominasi kekuasaan, dalam piranti aparatus negara ideologis, mengandalkan mode ideologi tertentu untuk menciptakan subyek. Pembentukan subyek ini dapat kita temukan ketika aparatus negara ideologis menyapa, merayu, dan mengajak subyek untuk menjadi pengikut. Slogan "Bersama Kita Bisa", misalnya, berperan secara simpatik untuk mengajak masyarakat bergabung dalam kebersamaan ideologis dibawah pemerintahan SBY-JK. Dalam perspektif Althusser maupun Gramsci, slogan seperti itu berupaya menanamkan citra yang bersahabat bahwa pemerintah dekat dengan rakyat atau persoalan bangsa hanya bisa diatasi kalau pemerintah dan masyarakat bersatu padu.

Berangkat dari pemaparan diatas, kita dapat melihat bahwa pertautan kekuasaan dan kekerasan semakin kompleks. Kondisi ini didukung oleh fakta sosial yang mengalami perubahan terus-menerus akibat globalisasi ekonomi pasar dan teknologi informasi yang terjadi di abad 21 ini. Arus globalisasi tidak hanya menandai kaburnya batas-batas negara, melainkan juga praktik kekuasaan dan kekerasan. Jika sebelumnya negara menjadi gugus institusi sentral dalam penggunaan kekuasaan dan kekerasan untuk mengendalikan masyarakat, maka dalam konteks masyarakat global saat ini negara tidak lagi menempati posisi sentral.

Salah satu fenomena menarik pada era globalisasi dewasa ini ialah munculnya sentrum-sentrum kekuasaan dan kekerasan disamping negara, seperti lembaga pengetahuan yang berfungsi sebagai *think-tanks* perubahan, institusi-institusi bisnis, organisasi masyarakat sipil, dan sebagainya. Perubahan ini memerlukan pola-pola baru penggunaan kekuasaan dan kekerasan selaras

dengan semakin majemuknya kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Strategi, taktik, dan teknik yang digunakan pun semakin canggih, sehingga pola kekuasaan dibuat seolah-olah terlepas dari kekerasan, ataupun sebaliknya.

Dengan begitu, relasi kekuasaan dan kekerasan menjadi tidak kentara dalam artian kekerasan yang ada tertutupi oleh kekuasaan yang bekerja secara halus melalui representasi simbol-simbol. Pola baru yang menandai relasi kekuasaan dan kekerasan melalui sistem representasi simbol mengharuskan adanya pergeseran pemahaman mengenai keduanya, baik kekuasaan maupun kekerasan.

Dari sini, konfigurasi baru kekuasaan dan kekerasan yang telah bermetamorfosis tersebut tidak lagi terobsesi pada narasi-narasi besar, melainkan menjelma dalam praktik simbolik yang dekat dengan kita. Peralihan pola tersebut selaras dengan kecenderungan “pembalikan ke arah bahasa” (*linguistic turn*).⁵ Dan salah satu tokoh yang memberikan perspektif baru mengenai pertautan kekuasaan dan kekerasan ini ialah Pierre Bourdieu. Dari Bourdieu, kita dapat menguak modus operandi kekuasaan yang terpatrit di dalam praktik simbolik bahasa/wacana⁶ sehingga melahirkan kekerasan simbolik sebagai sebuah mekanisme sosial untuk mereproduksi kekuasaan.⁷

⁵ Albert Borgman, *The Philosophy of Language: Historical Foundation and Contemporary Issues*, The Hague: Martinus Nijhof, 1974, hlm 37.

⁶ Pengertian wacana disini berangkat dari teori Ricouer mengenai wacana tuturan/ujaran.

⁷ Lihat karya Pierre Bourdieu yang mengeksplorasi pertautan relasi bahasa dengan relasi kekuasaan di dalam *Language and Symbolic Power*, Cambridge, Polity Press, 1991.

B. PERUMUSAN MASALAH DAN BATASAN MASALAH

Perumusan masalah berfungsi untuk merangsang *research question* dan mengeksplorasi data lebih jauh. Oleh karena itu, latar belakang masalah menjadi pijakan pokok dalam perumusan masalah. Adapun pokok permasalahan yang penulis teliti mengenai pemikiran politik Pierre Bourdieu adalah: **Bagaimana menjelaskan, menafsirkan, dan memahami kekerasan simbolik dalam kaitannya dengan upaya melestarikan serta mempertahankan kekuasaan?**

Berangkat dari pemaparan di latar belakang masalah, penelitian ini membatasi pokok-pokok pembahasannya pada tiga hal, yaitu:

1. Menjelaskan perangkat-perangkat kunci teoritik yang mendasari pemikiran Pierre Bourdieu.
2. Menafsirkan istilah kekerasan simbolik (*symbolic violence*) dan cara kerjanya dalam ranah sosial-politik terkait dengan relasi bahasa dan kekuasaan.
3. Memahami kekerasan simbolik yang bekerja di balik tata wacana neoliberalisme.

C. KERANGKA TEORI

Sebuah studi pemikiran yang mendasarkan pada kelimpahan pustaka cenderung menghasilkan kajian yang hanya menghadirkan kembali obyek pemikiran yang diteliti tanpa ada sesuatu yang baru dari obyek yang diteliti. Kadangkala studi pemikiran yang menggunakan literatur hanya akan menyajikan sebuah *review* buku. Karena itu, penelitian ini tidak semata untuk menjelaskan

tetapi sebagai upaya penyingkapan gagasan-gagasan di balik pemikiran seorang tokoh.

Sistem simbol merupakan medium yang menjadi perantara kita dalam memaknai sesuatu, memproduksi dan mengubah makna. Sistem simbol mampu melakukan semua ini karena ia beroperasi sebagai sistem representasi. Lewat simbol-simbol (bisa bahasa, wacana, gambar, dan sebagainya) kita mengungkapkan pikiran, konsep, dan ide-ide kita tentang sesuatu. Makna sesuatu hal sangat tergantung dari cara kita 'merekayasikannya'. Dengan membedah simbol-simbol yang kita gunakan dan imej-imej yang kita gunakan dalam merepresentasikan sesuatu, maka bisa terlihat jelas bagaimana proses pemaknaan, penilaian dan pembelokan tanda yang kita berikan pada sesuatu tersebut. Sistem representasi tak selalu menampilkan realitas sebenarnya, ia juga berperan membelokkan makna tanda. Untuk membongkar manipulasi sistem simbol – khususnya bahasa- terhadap realitas, maka penulis menggunakan tiga teori, yaitu:

1. Hermeneutika
2. Kekuasaan (*Power*)
3. Kekerasan (*Violence*)

1. Hermeneutika

Hermeneutika dapat diartikan sebagai teori analisis dan praktik penafsiran terhadap teks.⁸ Sebagai kajian filsafat yang memiliki perbedaaan dengan cara kerja epistemologi pada umumnya -yang menitikberatkan ukuran kebenaran pada rasionalitas ilmiah-, hermeneutika mengandung kemahiran untuk memahami teks-teks yang berada pada ruang relativitas kultural dan historis dari setiap wacana

⁸ Andrew Edgar & Peter Sedgwick, *Cultural Theory: The Key Concepts*, Routledge, 1999, hal. 165

manusia. Proses kegiatan reflektif terhadap pengetahuan dan karya manusia - dalam teori hermeneutika- selalu terkait dengan persoalan waktu, tempat, pencipta teks, dan subyek penafsir.

Merunut pada definisi etimologis, kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang mengandung arti menafsirkan atau menginterpretasikan. Sedangkan kata benda *hermeneia* berarti penafsiran atau interpretasi. Dari kedua istilah Yunani tersebut, teori hermeneutika seringkali diasosiasikan dengan nama dewa mitologis Yunani Hermes, yang secara metafor berperan sebagai utusan untuk menyampaikan pesan langit kepada manusia. Fungsi penting yang diemban Hermes itu menandakan bahwa 'pesan langit' harus diterjemahkan oleh Hermes agar dapat dimengerti oleh manusia. Bahasa langit sungguh berbeda dengan bahasa manusia. Karena itu, pesan langit harus diterjemahkan secara operasional agar manusia dapat menangkap makna pesan tersebut.

Penjelasan senada mengenai makna hermeneutika juga dijelaskan oleh Zygmunt Bauman. Dalam pandangannya, hermeneutika yang berasal dari kata Yunani "*hermeneutikos*" berkaitan erat dengan "upaya menjelaskan atau menelusuri" pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan atau tulisan yang tidak jelas, samar, remang-remang dan penuh kontradiksi, sehingga menimbulkan kebingungan atau kebingungan bagi para pendengar atau pembaca.⁹ Artinya, makna dari sebuah teks dapat dipahami secara beragam oleh pembaca yang kemudian melahirkan penjelasan yang berbeda pula. Hal ini menandakan bahwa

⁹ Komaruddin Hidayat, *Menafsirkan Kehidupan Tuhan*, Jakarta: Teraju, 2003, hlm. 138

pembaca bisa mengalami kebingungan ketika dihadapkan pada berbagai dokumen yang berbeda penjelasannya. Karena itu, berhasil-tidaknya pembaca menangkap pesan dari sebuah teks sangat tergantung pada upayanya mengatasi kesenjangan jarak, bahasa, kultur, serta maksud pencipta teks.

Dari berbagai pengertian hermeneutika yang didefinisikan secara beragam oleh berbagai pemikir, Paul Ricouer –salah satu pakar hermeneutika kontemporer dari Perancis- merupakan salah satu kontributor penting mengenai hermeneutika. Dalam pendahuluan bahasannya mengenai *The Task of Hermeneutics*, Ricouer mendefinisikan hermeneutika sebagai “teori tentang seluk-beluk pemahaman dalam hubungannya dengan kegiatan menafsirkan teks”.¹⁰ Dari batasan pengertian hermeneutika ini, Ricouer berambisi memperluas peran hermeneutika ke dalam ilmu-ilmu sosial lainnya sehingga kegiatan hermeneutika tidak berhenti pada persoalan wacana semata, namun lewat kegiatan hermeneutik kita dapat melakukan analisa sosial, kritik ideologi, dan lainnya.

Obsesi Ricouer meletakkan persoalan-persoalan hermeneutika ke dalam pembicaraan ilmu-ilmu sosial dan disiplin akademis didasarkan oleh peran sentral teks dalam hermeneutika. “Text”, kata Ricouer, “*is any discourse fixed by writing*”. Namun teks, tambah Ricouer, benar-benar mejadi teks ketika wacana-tuturan berubah menjadi wacana-tulisan. Artinya, teks tidak terbatas mereproduksi ujaran yang telah diujarkan, tapi menempatkan ujaran tersebut ke dalam huruf-

¹⁰ “Hermeneutics is the theory of the operations of understanding in their relation to the interpretation of texts”. Pengertian hermeneutika ini dapat dilihat dalam karya Ricouer, *Hermeneutics and The Human Sciences*, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, hlm. 42

huruf tertulis.¹¹ Dengan kata lain, kata-kata yang tertulis berlaku sebagai pengganti kata-kata yang diucapkan.

Ketika muncul persoalan-persoalan khusus yang disebabkan oleh interpretasi teks -bukan dalam bahasa lisan-, dan kalau yang disebut hermeneutika adalah pergulatan dengan persoalan-persoalan tersebut, maka ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan lainnya dapat dikategorikan sebagai hermeneutika. Untuk mendukung hipotesa ini, Ricouer berargumen:

*"...The human sciences may be said to be hermeneutical (1) inasmuch as their objects displays some of the features constitutive of a text as text, and (2) inasmuch as their methodology develops the same kind of procedurs as those of Auslegung or text-interpretation."*¹²

Di tangan Ricouer hermeneutika tidak disempitkan pada satu jenis analisis saja, seperti kritik ideologi oleh Habermas, fenomenologi *dasein* oleh Heidegger, atau post-strukturalisme oleh Derrida. Ricouer bergegas mengatasi persoalan-persoalan hermeneutika secara lebih metodis daripada terkungkung pada kategorisasi yang sempit. Dalam hal ini, Ricouer mencoba merefleksikan secara kritis berbagai problem hermeneutika seraya menjernihkannya.¹³

Pembicaraan mengenai hermeneutika akan menghadapkan kita pada problem hermeneutik yang syarat dengan bayang-bayang relativisme pemahaman. Persoalan hermeneutika itu bersarang pada perbedaan antara maksud pengarang dan maksud teks, dunia (waktu dan tempat) ketika teks itu ditulis dan dunia ketika

¹¹ Paul Ricouer, *ibid*, hlm 145-147.

¹² Paul Ricouer, *ibid*, hlm 197.

¹³ Pengantar yang bagus untuk memetakan perkembangan teori hermeneutika Ricouer dalam posisinya dengan pendekatan hermeneutika yang lain dan untuk memahami inti metode hermeneutika Ricouer dapat dilihat pada tulisan John B.Thompson dalam kata pengantar karya

teks itu dibaca. Apakah pemahaman kita terhadap teks harus sesuai dengan maksud pengarang atau interpretasi kita terlepas dari maksud subyektif pengarang? Pada titik inilah hermeneutika menjadi perdebatan klasik sekaligus menjadi inti persoalan hermeneutika (*the core of hermeneutical problem*).

Untuk mengatasi persoalan hermeneutika tersebut, penulis lebih cenderung mengambil hermeneutika teks Paul Ricouer (dalam sudut pandang subyektif penulis) sebagai metode yang mampu mendamaikan dan memberikan horizon baru bagi pemaknaan relasi pengarang-teks-pembaca. Dalam pandangan Ricouer, wacana ujaran yang telah menjadi wacana tulisan (teks) dapat bersifat otonom untuk melakukan “dekontekstualisasi” dan “rekontekstualisasi”. Kegiatan dekontekstualisasi memiliki arti bahwa materi teks “melepaskan diri” dari konteks pengarang (maksud atau intensi subyektif pengarang) untuk masuk ke konteks pembaca yang lebih luas lagi (rekontekstualisasi).¹⁴

Melalui dekontekstualisasi dan rekontekstualisasi, kedudukan pengarang dan pembaca menjadi sejajar untuk memberikan pemaknaan terhadap teks. Teks menjadi terbuka seolah-olah memberikan izin bagi pembaca untuk menyelami dan memahaminya. Dengan demikian, kita akan lebih mudah mengatasi “kesenjangan jarak” yang ada serta memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami teks dengan tidak harus mencari makna yang sesuai dengan maksud pengarang.

¹⁴ Secara normatif, “dekontekstualisasi” berarti proses ‘pembebasan’ diri dari konteks; “rekontekstualisasi” bermakna proses masuk kembali ke dalam konteks. Lihat pemaparan E.

2. Kekuasaan

Istilah kekuasaan memiliki pengertian yang beragam, digunakan dalam berbagai aspek pengetahuan dan tatanan kehidupan. Istilah ini bisa menunjuk pada kekuasaan ekonomis, kekuasaan politik, kekuasaan militer, dan sebagainya. Lazimnya, kekuasaan berbicara mengenai hubungan antara yang menguasai dan yang dikuasai dalam sebuah institusi yang disebut negara. Kemajemukan makna kekuasaan mengisyaratkan perbedaan dalam hal mengidentifikasi sumber-sumber kekuasaan, penyelenggaraan kekuasaan, dan siapa yang berhak memegang kekuasaan.

Pada level teoritik, ada yang mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, ada pula yang melihat kekuasaan dari segi kemampuan untuk menentukan keputusan sehingga orang lain mengikuti putusan tersebut sesuai dengan kehendak dari yang membuat keputusan.

Pemikiran politik sejak dulu menjadikan istilah kekuasaan sebagai kajian sentral dan berusaha mengurai definisi kekuasaan berdasarkan berbagai sudut pandang. Plato dalam pemikiran politiknya mengkaitkan definisi kekuasaan dalam dua istilah Yunani, yaitu "*peithein*" yang berarti persuasi dan "*bia*" yang berarti paksaan atau kekerasan.¹⁵ Plato mengartikan kekuasaan dalam istilah yang pertama yakni persuasi. Bagi plato, kekuasaan haruslah dimaknai sebagai kesanggupan meyakinkan (persuasi) orang lain agar orang yang telah diyakinkan itu melakukan apa yang telah diyakininya sesuai dengan kehendak orang yang

¹⁵ I U. Dener, *Etiologi Politik Plato, Aristoteles, Aquinas, Machiavelli, Locke, Rousseau, Derrida*

melakukan persuasi itu.¹⁶ Melalui definisi itu, Plato menghendaki kekuasaan dilakukan dalam rangka mengarahkan, membimbing manusia untuk mencapai kebenaran sejati. Unsur paksaan atau kekerasan hanya dapat digunakan pada kondisi darurat atau keadaan yang sangat terpaksa.

Bagi Plato, kekuasaan berada terpusat ditangan negara sebagai sebuah institusi sentral bagi pengambilan keputusan publik yang ditujukan untuk keseluruhan masyarakat. Namun yang mendasari para penguasa menggunakan kekuasaannya ialah pengetahuan, bukan kekayaan ekonomi, pangkat atau kedudukan. Harapannya agar penguasa mampu menyelenggarakan kekuasaan dengan cara yang arif dan bijaksana layaknya peran ayah terhadap anak-anaknya.¹⁷

Berbeda dengan Plato yang melihat kekuasaan bersumber pada ilmu pengetahuan, Aristoteles menyatakan bahwa kekuasaan haruslah bersumber pada hukum. Aristoteles menggunakan istilah *politeia* (pemerintahan yang berkonstitusi) untuk menunjuk tata pemerintahan yang paling realistik dan praktis dengan hukum sebagai sumber kekuasaannya.¹⁸ Tujuannya agar mereka yang berkuasa mampu mengarahkan pemerintahannya pada kepentingan, kebaikan, dan kesejahteraan umum. Lewat hukumlah sebuah pemerintahan akan mendapatkan kedaulatan dan kewibawaan tertinggi.

¹⁶ J.H. Rapar, *ibid*, hlm 85.

¹⁷ Plato menyamakan penyelenggaraan kekuasaan pada negara dengan institusi keluarga. Negara diasumsikan sebagai suatu keluarga besar dan hubungan penguasa dengan warga negara hendaklah mencontoh hubungan seorang ayah dengan anak-anaknya.

¹⁸ J.H. Rapar, *ibid*, hlm 85.

Kekuasaan –dalam filsafat politik Aristoteles- masih memusatkan diri pada gambaran politik yang berpusat pada negara. Hal ini dapat dilihat pada tawaran Aristoteles mengenai bentuk pemerintahan yang terbaik yaitu politeia, bukan monarki, oligarki, ataupun demokrasi.¹⁹ Aristoteles menegaskan bahwa penyelenggaraan kekuasaan oleh para penguasa negara haruslah senantiasa memperhatikan dimensi etis (penghargaan dan penghormatan) terhadap kebebasan dan kesamaan derajat warga negaranya.

Jikalau pemikiran politik klasik (Plato dan Aristoteles) masih mengkaitkan dimensi etik dalam studi kekuasaan, Niccolo Machiavelli –salah seorang pemikir berpengaruh tentang negara- meneropong kekuasaan sebagai sebuah alat untuk mempertahankan dominasi negara. Pandangan Machiavelli menitikberatkan bahwa kekuasaan bukanlah alat yang mengabdikan pada kebaikan, kesejahteraan, kebebasan, bahkan Tuhan sekalipun. Kekuasaan merefleksikan dirinya sebagai alat yang hanya mengabdikan pada kepentingan negara semata.

Ibarat kata, kekuasaan hanyalah hamba negara yang siap berbuat apa saja demi kepentingan negara meskipun harus melanggar sistem norma yang diyakini secara umum. Negara merupakan sumber utama terwujudnya kekuasaan politik yang absah, bukan Tuhan, kekayaan materi, jabatan atau posisi. Agar kekuasaan dapat mewujudkan kedaulatan negara yang absolut, Machiavelli membenarkan

¹⁹ Monarki berasal dari kata Yunani *monarchia* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan berada di tangan satu orang. Oligarki berarti kekuasaan berada di tangan beberapa orang. Aristoteles menganggap oligarki sebagai bentuk penyimpangan karena konsentrasi kekuasaan berada ditangan segelintir orang kaya saja. Sedangkan demokrasi diartikan sebagai kekuasaan ditangan banyak orang (rakyat). Rakyat disini dimaksudkan oleh Aristoteles menunjuk pada orang miskin. Karena itu, Aristoteles tidak menyetujui bila kekuasaan diimani dalam bentuk demokrasi.

penggunaan kekuasaan yang bersifat despotik.²⁰ Bagi Machiavelli, hanya ada satu kaidah etis: yang baik adalah apa saja yang memperkuat kekuasaan raja.²¹

Dalam *Il Principe*, Machiavelli²² menyatakan bahwa penyelenggaraan kekuasaan despotik tidak ditentukan oleh legitimasi moral, tapi yang menentukan ialah strategi dan taktik untuk mempertahankan dominasi. Teknik itu dapat berupa kepura-puraan, kemunafikan, kelicikan, ancaman, teror, kekerasan fisik, pengkhianatan dan lainnya. Yang penting ialah semua teknik tadi bisa menjamin stabilitas kekuasaan negara. Tak berbeda dengan Plato dan Aristoteles, kita pun masih menemukan corak kekuasaan yang bersifat *state-centric* dalam filsafat politik Machiavelli.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan jaman, makna kekuasaan bergeser kepada proses interaksi antar individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dan saling mempengaruhi. Meminjam konsepsi kekuasaan menurut Max Weber bahwa, "*Power as the probability that the one actor within a social relationship will be in a position to carry out his own will despite resistance*".²³ Kekuasaan selalu ada dalam seluruh relasi sosial, dari perkawinan hingga pada domain negara. Agar kekuasaan dapat berjalan efektif dalam operasionalisasinya,

²⁰ Despotik merujuk pada kata Yunani *despotike* yang menggambarkan penggunaan kekuasaan dalam hubungan majikan-budak. Bacaan lebih lanjut mengenai filsafat politik Machiavelli dapat dilihat dalam St. Sularto, *Penguasa Arsitek Masyarakat*, Jakarta, Kompas, 2003 dan J.H. Rapar, *Filsafat Politik: Plato, Aristoteles, Augustinus, Machiavelli*, Jakarta, Rajawali Press, 2001.

²¹ Franz Magnis-Suseno, *Kuasa & Moral*, Jakarta, Gramedia, 2001, hlm 8.

²² Machiavelli sering dianggap sebagai pemikir yang memperbolehkan penggunaan secara cara untuk mendapatkan kekuasaan. Anggapan ini dapat kita temukan dalam karyanya *Il Principe*. Namun di karya lainnya, *Discorsi*, Machiavelli mengatakan bahwa rakyat memiliki kekuasaan untuk menolak penguasa yang despotik. Dalam karyanya ini, Machiavelli menganjurkan agar penguasa menghindari dari penyakit rakus dan iru melalui pembatasan masa kekuasaan. Lihat *Politik Kerakyatan Menurut Niccolo Machiavelli*, Jakarta, KPG, 1996.

²³ Arnold K. Shaffer & Alice Kalber, *The Social Basis of Politics*, California, Wadsworth

maka diperlukan kekuatan atau otoritas yang sah. Legitimasi ini menjadi sah jikalau kekuasaan diletakkan dalam kerangka sistem dan tindakan yang rasional, yaitu birokrasi.

Selain definisi kekuasaan menurut Weber di atas, Karl Marx juga melihat kekuasaan selalu berisi maksud atau tujuan. Bagi Marx, relasi kekuasaan berada pada wilayah kepentingan kelas, antara kelas dominan (bourjuasi atau elit negara) dengan kelas marginal. Kelas borjuis memiliki kepentingan untuk memanipulasi kesadaran kelas marginal. Basis kepentingan tersebut bukan ditentukan oleh keinginan untuk diakui tapi lebih pada kondisi material yang mengitarinya.²⁴

Dari penjelasan di atas, pemaknaan terhadap kekuasaan lebih berkisar pada *state-centric*. Kekuasaan dilihat dalam kaca mata yang serba makro, hierarkis, dan cenderung menafikan konteks mikro-politik yang senyatanya selalu manusia alami dan berhadapan langsung. Kekuasaan tidaklah berada diluar sana dan berjarak dengan kita atau dalam hubungan *state-society*. Ia hadir dekat dengan kita dan menyebar dalam setiap ranah sosial (*social field*) melalui praktik sosial. Perwujudannya dapat ditemukan dalam hubungan komunikasi, bahasa, ranah politik, atau ruang intelektual, yang mana kekuasaan selalu mereproduksi dirinya dalam pertarungan simbolis.

Kalau piranti kekuasaan diandaikan terbentuk dalam sebuah topografi ruang sosial, maka ruang sosial terdiri dari berbagai ranah-ranah yang berbeda tapi saling terkait. Perwujudan kekuasaan yang dominan memerlukan perangkat-perangkat simbolik untuk melegitimasi kekuasaan tersebut. Artinya, dominasi

kekuasaan tidak akan bisa terbentuk tanpa adanya akumulasi kapital (entah itu kapital ekonomi, sosial, kultural, maupun simbolik). Semakin besar volume kapital yang dimiliki seseorang atau institusi, semakin besar pula kekuasaan yang diwujudkankannya. Dengan demikian, kekuasaan sangat dipengaruhi oleh konsepsi ranah (*field*), skemata persepsi (*habitus*), kapital, dan praktik sosial.

Dari uraian tadi, pemahaman mengenai relasi kekuasaan tidak hanya menyebar pada ruang yang homogen. Keniscayaan heterogenitas kekuasaan memberikan sebuah fakta baru bahwa pola, strategi, dan teknik kekuasaan tersebar ke berbagai ranah sosial. Salah satunya ialah pada wilayah kultural, dimana sistem simbolik tidak saja berfungsi sebagai instrumen pengetahuan dan komunikasi, melainkan juga sebagai instrumen dominasi untuk menyatakan sebuah kekuasaan. Hal ini merupakan kepentingan sentral dalam konteks politik ketika sistem simbolik (bahasa, wacana) berperan melegitimasi terbentuknya otoritas untuk menciptakan ‘versi resmi dunia sosial’ atas nama kekuasaan tertentu.

3. Kekerasan

Secara umum, konsepsi mengenai kekerasan dapat dipilah ke dalam tiga pengertian. Pengertian *pertama*; kekerasan dipandang sebagai tindakan aktor atau kelompok aktor. *Kedua*; kekerasan diartikan sebagai produk dari struktur. Makna *ketiga*; kekerasan sebagai jejaring antara aktor dan struktur.²⁵

Kekerasan pada pengertian pertama banyak dibidani oleh kalangan biologi, fisiologi, dan psikologi. Dari aspek biologi dan fisiologi, kekerasan

²⁵ Lihat Thomas Santoso dalam buku *konsep Teori Teori Kekerasan*, Jakarta: Cahaya Indonesia

dimengerti sebagai kecenderungan biologis manusia dimana segi bawaan atau kelainan genetik menjadi faktor dominan lahirnya kekerasan. Seperti dinyatakan oleh Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler, istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan perilaku, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau bertahan (*deffensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain.²⁶ Uraian tersebut menempatkan kekerasan sebagai tindakan aktor atau kelompok yang mengandung sisi destruktif (merusak) dan membawa kerugian –berupa ancaman, teror, pembunuhan, atau tindakan fisik lainnya- pada pihak orang lain.

Konsepsi kedua mengenai kekerasan mengasumsikan bahwa kekerasan tidak saja berasal dari tindakan aktor atau kelompok karena dorongan biologis semata, tetapi diperluas kepada peran struktur yang berperan menghasilkan kekerasan. Struktur disini masih dipahami secara konvensional yaitu struktur negara beserta aparatusnya. Menurut Johan Galtung –salah satu pengembang teori kekerasan struktural- kekerasan lebih menunjuk pada upaya untuk menyumbat atau menghambat potensi yang dimiliki manusia agar tidak terealisasi secara aktual.²⁷ Jadi kekerasan struktural memiliki sifat tidak langsung, tidak tampak, statis dan menyimpan stabilitas sistem tertentu. Mekanisme kekerasan struktural pada prosesnya mengakibatkan distribusi yang tidak adil terhadap mereka yang berposisi subordinat.

²⁶ Lihat tulisan Jack D. Douglas & Frances Chaput Waksler yang berjudul *Kekerasan* dalam buku *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 11.

²⁷ Aktual disini berasal dari istilah *actus* yang berarti kegiatan atau aktivitas yang tidak tampak (seperti berpikir, merenung, dan kegiatan mental lainnya) dan mencakup juga aktivitas yang tampak. Lihat J. Murno Windu, *Kekerasan & Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Jakarta

Kebalikan dari kedua konsepsi tersebut, pengertian ketiga berusaha untuk meneropong kekerasan sebagai rangkaian jejaring dialektis antara aktor dan struktur. Seperti yang dijelaskan oleh Lester R Kutz dan Jennifer Turpin, studi terhadap kekerasan masih membedakan antara pendekatan tingkat mikro dan makro, dimana pendekatan mikro lebih terfokus pada individu dengan mengabaikan situasi-situasi makro yang mengitarinya, ataupun sebaliknya. Kutz dan Turpin menganggap kekerasan tidak saja disebabkan oleh faktor psikologis individu, gejala biologis, atau faktor sosial-struktural, tetapi disebabkan oleh suatu hubungan kausal antara struktur, proses, dan perilaku *level-personal* dan *level-global*.²⁸ Pendekatan ini menggambarkan bahwa terdapat hubungan dialektis antara kekerasan aktor dan struktur, serta setiap hubungan kekerasan membentuk jejaring yang saling bertaut.

Apabila konsepsi kekerasan dimaknai sebagai sebuah upaya menghadirkan pemaksaan sebagai mekanismenya, maka kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Ia bisa berupa kekerasan fisik dengan raga sebagai obyek kekerasan, bisa pula kekerasan psikologis (jiwa), kekerasan struktur negara terhadap individu ataupun kelompok, dan bisa pula berupa kekerasan ide, wacana, bahasa, maupun bentuk-bentuk simbolik lainnya.

Pola-pola kekerasan selalu berada dalam ruang kekuasaan. Keduanya tidak bisa dipisahkan secara diametral. Artinya, kehadiran kekerasan mengandaikan mekanisme kekuasaan tertentu. Begitupun dengan konsepsi dan pola kerja kekerasan simbolik selalu menyimpan relasi kekuasaan tertentu. Interaksi

²⁸ Lester R Kutz & Jennifer Turpin, "Menguraikan Jaringan Kekerasan" dalam buku *Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 200.

kekuasaan untuk mendapatkan dominasi membutuhkan mekanisme obyektif agar dapat diterima oleh individu atau kelompok yang akan dikuasai.

Mekanisme ini berjalan secara halus sehingga menyebabkan yang didominasi tidak sadar, patuh, dan menerima begitu saja. Mekanisme ini disebut sebagai kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Istilah ini dipopulerkan oleh Pierre Bourdieu dalam berbagai karyanya, seperti *Outline of a Theory of Practice* atau *Language & Symbolic Power*. Kekerasan simbolik diartikan Bourdieu sebagai "...lemah lembut, bentuk kekerasan yang tak tampak, tidak diakui sebagai kekerasan, dipilih sebagaimana juga diberikan, kekerasan yang didasarkan pada percaya diri, loyalitas personal, kesediaan menerima, pemberian, hutang (budi), pengakuan, kesalehan; semuanya diterima sebagai penghormatan etis".²⁹ Dengan begitu, kekerasan simbolik merupakan bentuk kekerasan yang halus dan tak tampak yang menyembunyikan di baliknya relasi kekuasaan.

Kekerasan simbolik bekerja dengan menyembunyikan pemaksaan dominasi untuk menjadi sesuatu yang diterima sebagai "yang memang seharusnya demikian". Inilah yang kemudian membuat mereka yang terdominasi menjadi tidak keberatan atau "ikhlas" untuk dikuasai dan berada dalam lingkaran dominasi.

²⁹ "...the gentle, invisible form of violence, misrecognized as such, chosen as much as it is submitted to, the violence of confidence, of personal loyalty, of hospitality, of the gift, of the debt, of recognition, of piety —of all virtues, in a word, which are honoured by the ethics of honour".

D. DEFINISI KONSEPSIONAL

1. Hermeneutika: seni interpretasi teks yang terkandung didalamnya upaya melepaskan diri dari konteks pengarang (dekontekstualisasi) untuk kemudian dihadapkan pada konteks pembaca yang lebih beragam (rekontekstualisasi). Melalui proses distansiasi, posisi pengarang dan pembaca mejadi sejajar dalam melakukan kegiatan hermeneutik. Pembaca (baca: penafsir) dapat menafsirkan teks lepas dari maksud pengarang melalui tulisan yang ada. Dari kegiatan hermeneutik terdapat usaha merawat keterbukaan teks dalam relativitas kultural dan historis dari setiap wacana manusia.

2. Kekuasaan didefinisikan tidak sekedar cara mempengaruhi orang lain, melainkan lebih pada kecenderungan kekuasaan untuk terus dipelihara, dilestarikan, dan diproduksi kembali. Kekuasaan terbentuk dalam ruang sosial dan ditentukan oleh besarnya volume kapital yang dimiliki seorang aktor atau institusi. Kekuasaan tidak saja melekat pada struktur negara beserta aparatusnya semata, tetapi juga pada modus simbolik (seperti bahasa) yang diciptakan oleh penguasa untuk menentukan “visi dunia” yang paling benar.

3. Kekerasan: hubungan dialektis dan relasional antara aktor dan struktur, dimensi mikro dan dimensi makro. Kekerasan menghadirkan mekanisme pemaksaan dalam berbagai bentuk. Bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikologis, kekerasan struktur negara terhadap masyarakat, serta kekerasan wacana atau simbol. Kekerasan yang bekerja pada level simbolik bersifat tidak langsung dan tersembunyi serta mengondung upaya mengasingkan seseorang atau kelompok

E. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersandar pada aspek studi pemikiran tokoh. Karena yang dijadikan obyek penelitian ini adalah karya yang dihasilkan oleh seorang tokoh, dalam hal ini Pierre Bourdieu, maka studi yang penulis lakukan berupa studi deskriptif yang selanjutnya akan diolah dengan menggunakan telaah hermeneutika Paul Ricoeur.

Seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan mengenai hermeneutika, Paul Ricoeur mendefinisikan hermeneutika sebagai “teori tentang seluk-beluk pemahaman dalam hubungannya dengan kegiatan menafsirkan teks”. Adapun langkah-langkah metodis hermeneutika teks Paul Ricoeur meliputi: (a) realisasi bahasa sebagai wacana (wacana-bahasa); (b) perubahan wacana-tuturan menjadi wacana-tulisan; dan (c) teks sebagai inti hermeneutika (dunia teks). Langkah-langkah metodis kegiatan hermeneutika ini –dalam pemikiran Ricoeur- dilakukan melalui distansiasi (*distanciation*) dan apropriasi (*appropriation*) dimana keduanya menjadi perangkat kunci bagi pendekatan hermeneutika teks.

A. Realisasi Bahasa sebagai Wacana (Wacana-Bahasa)

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai perwujudan bahasa sebagai wacana, perlu kiranya diketahui bahwa hermeneutika mengenal dualitas bahasa seperti halnya semiotika dan kajian linguisitik struktural. Jikalau dalam semiotika - seperti yang dicetuskan Ferdinand de Saussure- membedakan antara “*langue*” dan “*parole*” maka dalam hermeneutika, perbedaan ini ditemukan pada “*langue*”

Pengertian *langue* (bahasa, *language*) merujuk pada bahasa secara umum, yaitu bahasa sebagai sistem yang terdiri atas tanda-tanda linguistik yang terlepas dari kondisi sosio-historis dan psikologis pengarang. Sedangkan *parole* (ucapan, *speech*) mengacu pada penggunaan bahasa individual yang bersifat khas, apa yang dituturkan seseorang pada saat dan tempat tertentu.³⁰ Dalam hermeneutika, posisi *parole* digantikan oleh wacana (*discourse*). Wacana disini diartikan sebagai bahasa yang dipakai dengan kalimat (*sentences*) sebagai satuan pembentuknya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa wacana merupakan ucapan (*speech*).

Kalau begitu, apa yang menjadi perbedaan antara bahasa dan wacana? Paul Ricouer melihat perbedaan ini pada persoalan dialektika dua kutub –yang terdapat pada lokus wacana- yaitu peristiwa (*event*) dan makna (*meaning*).³¹ Dari kedua kutub inilah, wacana membedakan dirinya dari bahasa.

Menurut Ricouer, ketika wacana dipahami sebagai peristiwa mengasumsikan “ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang berbicara”.³² Arti “sesuatu yang terjadi” mengacu pada pemahaman bahwa wacana adalah peristiwa dengan empat ciri yang menyertainya. Keempat ciri tersebut antara lain: (1) wacana selalu terkait dengan tempat dan waktu tertentu; (2) wacana selalu memiliki subyek dalam arti “siapa yang berbicara?” (*who speaks?*). Peristiwa terjadi ketika ada seseorang yang menghadirkan bahasa dalam waktu dan tempat tertentu. (3) wacana selalu menunjuk pada sesuatu yang sedang dibicarakan,

³⁰ Dr. Akhyar Yusuf Lubis, *Masih Adakah Tempat Berpijak Bagi Ilmuwan*, Bogor, Akademia, 2003, hlm 99. Lihat juga Mudji Sutrisno & Hendar Putranto, *Teori-Teori Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 2005, hlm 129.

³¹ Lihat penjelasan Ricouer mengenai realisasi bahasa sebagai diskursus pada bukunya

pengucap. Alhasil, wacana sebagai makna mengantarkan kita pada persoalan mendasar hermeneutik, makna menurut pengarang atau pembaca? Apakah kita masih mendapatkan apa “yang diucapkan” (*said*) didalam tulisan? Dengan menggunakan teori *speech-act* John L. Austin, Ricouer menunjukkan bahwa lewat tulisan, wacana dapat mempertahankan maksud pengucap.

B. Perubahan Wacana-Tuturan Menjadi Wacana-Tulisan

Dalam penafsiran, kita bukan hanya berhadapan dengan pernyataan verbal yang disusun oleh satu per satu kalimat, melainkan juga berhadapan dengan tulisan yang dirangkai oleh banyak kalimat. Kita sudah mengetahui bahwa yang mendorong perubahan wacana menjadi sebuah karya adalah dialektika antara dua kutub peristiwa dan makna.

Rangkaian kalimat yang dijewantahkan ke dalam tulisan inilah yang disebut oleh Ricouer sebagai karya (*work*). Manifestasi wacana dalam bentuk karya (korpus tekstual) mensyaratkan wacana haruslah sebagai satu kesatuan yang terstruktur, memiliki *genre* (jenis) yang berbentuk kodifikasi dengan aturan dan komposisi yang berlaku, dan memiliki konfigurasi unik (*style*) yang dikaitkan dengan ciri khas individu (penulis) dalam menciptakan gaya.³⁵ Realisasi wacana sebagai karya juga memberlakukan dua kutub yang terdapat didalam wacana, yaitu peristiwa dan makna. Di satu sisi, sebuah karya dikaitkan dengan peristiwa ketika kita memahami bahwa kegiatan menciptakan karya yang terstruktur, memiliki *genre* dan *style* tertentu memnakan aspek kejadian. Di sisi lain sebuah

Dari uraian di atas, kita dapat melihat ketika wacana yang diungkapkan berubah menjadi wacana yang dituliskan (korpus tekstual, karya) semakin menjauhkan hubungan antara maksud yang diinginkan pengarang dan apa yang disebutkan oleh teks. Perubahan ini menciptakan proses penjarakan antara dunia ketika teks dibuat dan dunia ketika teks dibaca. Kondisi ini, menurut Ricoeur, menimbulkan konsekuensi hermeneutik dimana tulisan menjadikan teks otonom dari jangkauan maksud pengarang, di sisi lain, tulisan menciptakan kondisi teks yang terbuka pada berbagai pembacaan dengan konteks sosio-budaya yang berbeda.³⁶ Dengan kata lain, lanjut Ricoeur, didalam otonomi teks memungkinkan terlepasnya 'substansi teks' (*matter*) dari horizon maksud pengarang.

Dengan demikian, kita dapat menemukan beberapa hal pokok yang dihasilkan dari pegeseran dari wacana-tuturan menjadi wacana-tulisan, yaitu:

1. Terjadi kesenjangan antara maksud pengarang dan apa yang dikatakan teks.
2. Teks menjadi terbuka untuk diinterpretasi oleh berbagai pembaca dengan konteks yang berbeda-beda.
3. Tugas pengarang telah selesai ketika ia menulis teks.
4. Posisi pengarang dan pembaca menjadi sejajar untuk memberikan makna dan rujukan terhadap teks.

C. Teks sebagai Inti Hermeneutika (Dunia Teks)

Perubahan dari wacana-ujaran menjadi wacana tulisan menimbulkan persoalan lebih lanjut yaitu menyangkut kedudukan dunia teks. Problem tersebut terkait dengan konsepsi mengenai *sense* (arti) dan *reference* (rujukan). *Sense* adalah isi ideal wacana menurut struktur formalnya. Sementara *reference* adalah

gerak transenden untuk menjangkau realitas yang terkait dengan klaim kebenaran.³⁷

Kalau dalam diskursus lisan, *reference* ditentukan oleh kemampuan membidik realitas dimana pembicara dan lawan bicara dianggap sudah sama tahu mengenai rujukan yang sedang dibicarakan. Berbeda halnya dalam tulisan, kita tidak menemukan lagi situasi bersama antara pengarang dan pembaca.³⁸ Rujukan pengarang telah terhapuskan oleh teks. Sementara posisi pembaca menjadi besar untuk menemukan dan menyusun sendiri *reference* berdasarkan teks yang ada dihadapannya. Jadi, dunia teks inilah yang pada akhirnya ditafsirkan (apropriasi) oleh pembaca menjadi transformasi yang kreatif dan dinamis.

Setelah menjelaskan langkah-langkah metodis hermeneutika teks Ricoeur, perlu kiranya kita mengeksplorasi perangkat metodis yang dikembangkan Ricoeur, yaitu: distansiasi dan apropiasi. Distansiasi berkaitan erat dengan upaya membuat jarak antara apa yang dikatakan teks dari intensi subyek yang menulis. Distansiasi membedakan antara penafsiran si pembaca dengan makna yang dimaksud pengarang. Distansiasi memberikan prinsip hermeneutik bahwa menafsirkan teks bukan untuk menemukan makna obyektif yang dimaksudkan oleh pengarang, melainkan memungkinkan terjadinya berbagai penafsiran yang bermakna banyak (polisemi). Melalui distansiasi, kita bukan mencari sesuatu yang

Sedangkan apropriasi -diterjemahkan oleh Ricouer dari istilah Jerman *Aneignung*- yang berarti “menjadikan milik sendiri apa yang sebelumnya asing”.³⁹ Apropriasi sejalan dengan semangat distansiasi bahwa dalam menafsirkan teks, kita mengambil jarak dari intensi pegarang untuk kemudian penafsir/pembaca mampu memahami teks secara kreatif.

Dengan demikian, penelitian ini menjadikan metode hermeneutika Ricouer sebagai kegiatan interpretasi teks terhadap karya-karya Pierre Bourdieu. Penelitian ini tidak sekedar memaparkan karya Bourdieu apa adanya, melainkan melakukan analisa tematis mengenai kata kunci konseptual yang membangun pemikiran politik Pierre Bourdieu. Sejalan dengan semangat hermeneutika teks Ricouer, penulis selaku penafsir tidak berusaha menginterpretasi teks seperti yang diinginkan Bourdieu selaku pengarang. Disebabkan proses distansiasi, karya Bourdieu menjadi terbuka untuk menampilkan beragam penafsiran. Dengan begitu, penulis selaku pembaca bertujuan merawat keterbukaan teks Bourdieu serta memiliki kemandirian untuk memberikan *meaning* dan *reference* sesuai dengan kapasitas penulis selaku penafsir (apropriasi).

1. Teknik Pengumpulan Data

Persoalan selanjutnya adalah strategi pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah *library research* (studi kepustakaan). Teknik ini merupakan upaya pencarian data dengan menelusuri dan *re-discover* buku atau tulisan pengarang sendiri serta dokumentasi lain yang

mendukung pendalaman dan ketajaman analisis.⁴⁰ Studi pustaka ini bersumber pada buku-buku literatur, jurnal-jurnal ilmiah, situs, atau website yang berhubungan dengan penelitian ini.

Studi kepustakaan ini selain bersumber pada buku atau tulisan Pierre Bourdieu, juga melibatkan karya-karya penunjang dari berbagai sumber yang mencoba menafsirkan pemikiran Pierre Bourdieu. Tujuannya ialah memberikan jalinan intertekstual dan ruang dialogis dalam memahami teks-teks Bourdieu.

2. Teknik Analisa Data

Menurut para pakar peneliti, analisis data merupakan tahap yang penting dan menentukan karena pada tahap inilah data dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyampaikan kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.⁴¹ Untuk kepentingan penelitian ini, penulis akan menganalisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen hermeneutika teks Paul Ricouer.

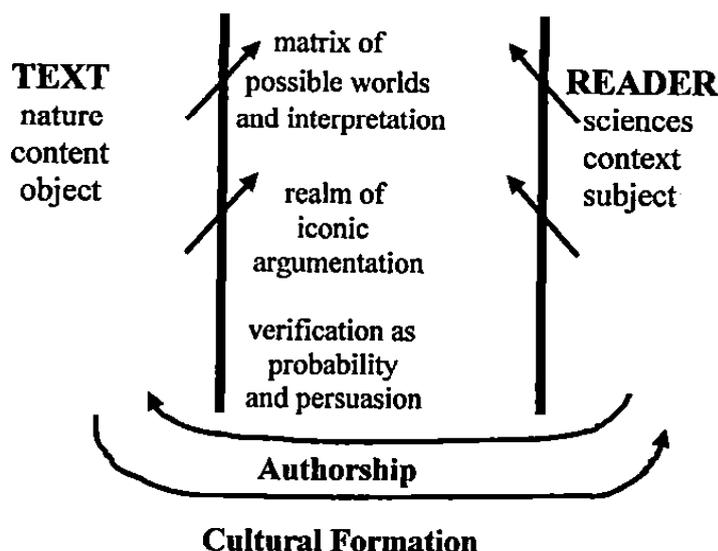
Data akan dianalisis secara kualitatif memiliki arti bahwa dalam menganalisis, penulis tidak mendasarkan pada angka-angka melainkan berdasarkan atas pandangan, pendapat dan pemikiran analisa data. Karena data yang diperoleh berupa teks-teks Pierre Bourdieu (buku, tulisan, dsb), maka analisis data penelitian ini mengasumsikan peran sentral teks dalam proses interpretasi. Teks-teks Bourdieu akan dianalisis secara kualitatif dan didekati dengan menggunakan instrumen hermeneutika teks Paul Ricouer. Adapun

⁴⁰ Masdar Umaruddin, *Membaca Pemikiran Gus Dur dan Amien Rais tentang Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999, hlm 20.

⁴¹ *Kesantiaanninemat Metode Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1980, hlm 228

mengenai penjelasan instrumen hermeneutika teks Ricoeur tersebut, penulis akan menyajikannya dalam bentuk skema dibawah ini.

Skema 1.1.
Hermeneutika Paul Ricoeur⁴²



Melalui skema di atas, kita melihat bahwa paradigma teks diasumsikan sebagai alam (*nature*) dan pembaca sebagai ilmu (*sciences*). Artinya, teks diibaratkan sebagai fenomena alam yang masih misterius dimana ia diposisikan sebagai obyek yang ditafsirkan. Sementara pembaca adalah subyek berilmu yang berusaha -dengan pengetahuan yang dimilikinya- menafsirkan fenomena alam (teks) yang masih terselubung tersebut. Antara teks dan pembaca mengalami proses penjarakan (*distansiasi*), teks sebagai obyek dan pembaca sebagai subyek.

Keterpisahan keduanya bukan berarti secara diametral tidak bisa bertemu, karena melalui *distansiasi* akan tercipta ruang interpretasi dan dialogis diantara

⁴² Skema ini disadur dari bab III disertasi William Grassie mengenai "A Hermeneutical Approach to Modern Science: Extending Paul Ricoeur's to Hermeneutics into the Biophysical Sciences", dalam *Reinventing Nature: Science Narratives as Myths for an Endangered Planet*, 1994. http://www.users.uic.edu/~wgrassie/Elder_Articles/eh3.html. Diakses pada tanggal 14 Maret

keduanya. Teks memproyeksikan rujukan nyata dirinya ke dalam ruang pembaca, begitu pun pembaca memproyeksikan model teoritik ke dunia teks. Bagaimana menentukan validitas penafsiran? Prosedur validasi lebih ditentukan oleh logika probabilitas daripada verifikasi empiris. Hal ini berarti upaya menunjukkan sebuah interpretasi lebih tepat (*probable*) didasarkan pada kekuatan argumentasi.

Pertemuan antara dunia teks dan pembaca dapat ditemukan pada gambar anak panah (*authorship* dan *cultural formation*). Proses melingkar ini menggambarkan bagaimana teks dibentuk oleh pembaca dan pembaca dibentuk oleh dunia teks melalui formasi budaya yang melatarbelakanginya. Teks menjadi terbuka untuk ditafsirkan oleh pembaca dengan konteks yang beragam dan pembaca dapat menentukan *meaning* dan *reference* secara otonom terlepas dari maksud pengarang. Dengan demikian, hubungan antara teks dan pembaca bersifat dinamis.

F. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan:

1. Memberikan wawasan baru mengenai studi kekuasaan dan kekerasan dalam diskursus ilmu politik.
2. Memperkaya metodologi ilmu politik dengan menggunakan pendekatan inter-disipliner seperti hermeneutika dalam studi

3. Membongkar kebekuan diskursus ilmu politik di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kegunaan Penelitian:

1. Memberikan sumbangan teoritik bagi kajian ilmu politik, khususnya relasi kekuasaan dan kekerasan bagi Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Pengayaan referensi mengenai studi pemikiran politik seorang tokoh yang berasal dari luar Indonesia.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, penulis membaginya dalam empat bagian dengan sub-topik pembahasan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Batasan Masalah
- D. Kerangka Teori
- E. Definisi Konseptual
- F. Kerangka Metodis
- G. Tujuan dan Kegunaan penelitian
- H. Sistematika Penulisan

Bab II: Pierre Bourdieu: Trajektori Kehidupan dan Program Pemikirannya

A. Biografi Pierre Bourdieu

B. Karya-Karya Bourdieu

1. *Algeria 1960*

2. *Distinction*

3. *Homo Academicus*

C. Program Pemikiran Pierre Bourdieu

1. Mendayung Di Antara Dua Karang

1.1. Model Berpikir Relasional

1.2. Praktik Sosial sebagai Jembatan Penghubung

1.3. Strukturalisme Konstruktivis (*Constructivist Structuralism*)

2. Upaya Mengatasi Fenomenologi dan Marxisme

2.1. Momen Keterputusan dari Fenomenologi

2.2. Momen Keterputusan dari Marxisme

Bab III: Bahasa, Pertarungan Kekuasaan Dan Kekerasan Simbolik

A. Perkakas Konseptual Pierre Bourdieu

1. *Habitus*

2. Ranah (*Field*) sebagai Arena Pertarungan dan Perjuangan

2.1. (*Habitus x* Modal) + Ranah = Praktik

2.2. Ranah dan Strategi

B. Menebar Kata, Menuai Kuasa

1. Sistem Simbol sebagai Instrumen Dominasi

2. Bahasa sebagai Ranah Pertarungan